
DOKUMEN KONTRAK

Nomor (Kemenkes) : KN.01.01/III.10/165/2020

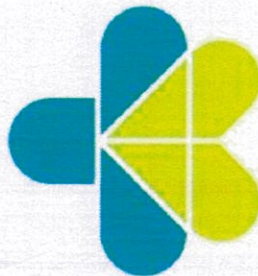
Nomor (Telkom) : K.TEL.95/HK.810/DGS-A1000000/2020

Tanggal : 2 Maret 2020

antara
Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan
dengan
Kemitraan TELKOM - INFOMEDIA

Untuk Melaksanakan
Pekerjaan Pengadaan Pusat Komando Nasional SPGDT Call Center 119

Tahun Anggaran
2020



**DIREKTORAT PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
2020**

Dokumen Kontrak ini ditandatangani oleh wakil sah para pihak, yaitu

dr. Asral Hasan, MPH
Pejabat Pembuat Komitmen Call Center 119
atas nama Kuasa Pengguna Anggaran
Satker Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan RI

dan

Mohammad Salsabil
Executive Vice President
Divisi Government Service
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Jasa Lainnya
Pengadaan Pusat Komando Nasional SPGDT Call Center 119
Nomor : KN.01.01/III.10/165/2020
Nomor : K.TEL.95/HK.810/DGS-A1000000/2020

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Senin tanggal Dua bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh (02-03-2020) antara:

dr. Asral Hasan, MPH, selaku Pejabat Pembuat Komitmen Call Center 119, yang bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan, yang berkedudukan di Gedung Adhyatma Lantai 4 Ruang 409 Kementerian Kesehatan jalan HR. Rasuna Said Blok X5 Kav 4-9 Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan No.KU.03.01/III.6/20/2020 tanggal 3 Januari 2020 (selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatangan Kontrak**") dan

Kemitraan TELKOM-INFOMEDIA yang beranggotakan sebagai berikut:

1. **Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk**, dalam hal ini diwakili oleh Mohammad Salsabil selaku Executive Vice President Divisi Government Service; dan
2. **PT. Infomedia Nusantara**, dalam hal ini diwakili oleh Niam Dzikri selaku Direktur Utama.

Yang masing-masing anggotanya bertanggung jawab secara pribadi dan tanggung renteng atas semua kewajiban terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan Kontrak ini dan telah menunjuk Mohammad Salsabil selaku Executive Vice President Divisi Government Service Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, yang berkedudukan di Jalan Japati Nomor 1 Bandung 40133, didirikan berdasarkan Akta Nomor 128 tanggal 24 September 1991, dibuat di hadapan Imas Fatimah, SH., Notaris di Jakarta, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Nomor 32 tanggal 21 Juni 2019, dibuat dihadapan Shasa Adisa Putrianti, SH., M.Kn., sebagai pengganti dari Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, bertindak untuk dan atas nama **KEMITRAAN TELKOM-INFOMEDIA** berdasarkan Surat Perjanjian Kemitraan Nomor: PKS-TEL.23/HK.810/DGS-A1000000/2019 - 217/IN/PERJ/LEGL-CORP/19 tanggal 26 Desember 2019 (selanjutnya disebut "**Penyedia**")

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- (b) Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga Pengadaan Pusat Komando Nasional SPGDT Call Center 119 Tahun Anggaran 2020 Nomor KN.01.01/7/0287/2020 tanggal 10 Februari 2020.
- (c) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: KN.01.01/III.10/143/2020 tanggal 24 Februari 2020, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut Pekerjaan Jasa Lainnya.
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Perubahan Waktu Pelaksanaan dan Nilai Kontrak Pekerjaan Pengadaan Pusat Komando Nasional SPGDT Call Center 119 Tahun Anggaran 2020 Nomor. KN.01.01/III.10/152/2020 tanggal 26 Februari 2020.
- (e) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan Jasa Lainnya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (f) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (g) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup Pekerjaan Jasa Lainnya sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dalam Kontrak ini;

Pasal 3
Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Kontrak Pekerjaan Jasa Lainnya ini menggunakan Jenis Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan.
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar **Rp9.789.263.000,- (Sembilan Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah).**

Pasal 4
Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum/Perubahan Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - d. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - e. Dokumen Penawaran;
 - f. Spesifikasi Teknis;
 - g. Daftar Kuantitas Dan Harga; dan
 - h. Dokumen lainnya seperti: jaminan, SPPBJ, BA Perubahan Waktu Pelaksanaan dan Nilai Kontrak, BAHP, BAST, BAP.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini dihitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan
Kementerian Kesehatan RI



dr. Asral Hasan, MPH
Pejabat Pembuat Komitmen Call Center 119

Untuk dan atas nama
KEMITRAAN TELKOM-INFOMEDIA
Penyedia



Mohammad Salsabil
Executive Vice President
Divisi Government Service

Mengetahui
Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan RI,
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,



dr. Tri Hesty Widyastoeti, Sp.M, MPH
NIP 196008101987112001

**DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA
PEKERJAAN PENGADAAN PUSAT KOMANDO NASIONAL
SPGDT CALL CENTER 119**

No.	Uraian	Volume		Jumlah Bulan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)	Jenis Kontrak
A	PABX dengan fungsi ACD (Automatic Call Distribution)						
1	License CC Elite Agent + Support	65	User	10	1.520.000	988.000.000	Satuan
2	License call management system Agent + Support	9	User	10	770.000	69.300.000	Satuan
3	License Computer Telephony Integration (CTI) TSAPI	9	User	10	770.000	69.300.000	Satuan
4	License Nice Voice Recording	9	User	10	770.000	69.300.000	Satuan
5	Licence Station Agent Inbound/outbond + support	9	User	10	770.000	69.300.000	Satuan
6	Layanan Hardware Core PABX	1	Paket	10	10.500.000	105.000.000	Lumsum
B	LayananSistem Aplikasi Kontak Center SPGDT						
1	Aplikasi Contact Center SPGDT	1	Paket	10	79.000.000	790.000.000	Lumsum
2	Modul Call Tracker	1	Paket	10	105.000.000	1.050.000.000	Lumsum
C	Layanan Perangkat Pendukung						
1	PC Desktop Agent	7	Unit	10	277.500	19.425.000	Satuan
2	Monitor Desktop agent 3 screen	21	Unit	10	55.000	11.550.000	Satuan
3	PC Desktop Support	2	Unit	10	277.500	5.550.000	Satuan
4	Monitor Desktop support 3 screen	6	Unit	10	55.000	3.300.000	Satuan
5	PC Desktop & Monitor Wallboard	4	Unit	10	350.000	14.000.000	Satuan
6	Monitor Splitter	9	Unit	10	15.000	1.350.000	Satuan
7	Switch	1	Unit	10	550.000	5.500.000	Satuan
8	Router	2	Unit	10	162.500	3.250.000	Satuan
9	Headset	9	Unit	10	75.000	6.750.000	Satuan
10	Antivirus Licence	9	Unit	10	410.000	36.900.000	Satuan
11	Server Aplikasi / Algoritma	1	Unit	10	3.400.000	34.000.000	Satuan
12	Server Database	2	Unit	10	3.400.000	68.000.000	Satuan
13	Server Call Tracker	1	Unit	10	3.400.000	34.000.000	Satuan
14	Rack server -42U	1	Unit	10	277.500	2.775.000	Satuan
15	UPS - 3KVA	1	Unit	10	415.000	4.150.000	Satuan
16	Dashboard Seamless System 49 Inchi + bracket	12	Unit	10	1.660.000	199.200.000	Satuan
17	Video Processor	2	Unit	10	24.610.000	492.200.000	Satuan
18	TV LED 42" Wallboard + bracket (untuk application integration)	6	Unit	10	125.000	7.500.000	Satuan
19	TV LED 42" Wallboard + bracket (untuk channel TV di CC & monitoring space)	4	Unit	10	125.000	5.000.000	Satuan
D	Ruangan Call Center Pendukung						
1	Meja kursi Agent	7	Unit	10	110.750	7.752.500	Satuan
2	Meja kursi support	2	Unit	10	110.750	2.215.000	Satuan
3	CCTV	3	Unit	10	262.500	7.875.000	Satuan
4	AC di ruangan call center	6	Unit	10	88.350	5.301.000	Satuan
E	Connectivity						
1	Layanan sip trunk	2	Unit	10	2.800.000	56.000.000	Lumsum
2	Hardware SBC 10 Mbps	1	Unit	10	5.350.000	53.500.000	Lumsum
3	Internet Dedicated 80 Mbps	1	Unit	10	60.000.000	600.000.000	Lumsum
4	Link Backbone VPN IP 45 Mbps	1	Unit	10	20.100.000	201.000.000	Lumsum
5	Metro-E 10 Mbps DC - Sip Trunk	1	Unit	10	5.500.000	55.000.000	Lumsum
6	Metro-E 10 Mbps DC - Call Tracker	1	Unit	10	5.500.000	55.000.000	Lumsum

No.	Uraian	Volume		Jumlah Bulan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)	Jenis Kontrak
7	Koneksi VPN IP 1 Mbps Integrasi 56 PSC	1	Unit	10	46.557.650	465.576.500	Lumsum
F	SDM						
1	SDM Agent	27	Org	10	7.800.000	2.106.000.000	Satuan
2	SDM - Supervisor dokter	4	Org	10	11.409.000	456.360.000	Satuan
3	SDM - IT Support	4	Org	10	8.025.000	321.000.000	Satuan
G	Lain - Lain						
1	Instalasi untuk 30 PSC (existing)	1	Paket	-	0	0	
2	Instalasi untuk 26 PSC Baru	1	Paket	-	320.810.000	320.810.000	Lumsum
3	Outbond Call	1	Paket	10	2.134.000	21.340.000	Satuan
Sub Total						Rp8.899.330.000	
PPn (10%)						Rp889.933.000	
Total						Rp9.789.263.000	

Terbilang : Sembilan Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah

Untuk dan atas nama
Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan
Kementerian Kesehatan RI


dr. Asrat Hasan, MPH
Pejabat Pembuat Komitmen Call Center 119

Untuk dan atas nama
KEMITRAAN TELKOM-INFOMEDIA
Penyedia


Mohammad Salsabil
Executive Vice President
Divisi Government Service

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

- 1.1 **Jasa Lainnya** adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
- 1.2 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **PA** adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.
- 1.3 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat **KPA** adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
- 1.4 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disingkat **PPK** adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
- 1.5 **Pejabat Penandatangan Kontrak** adalah PA, KPA, atau PPK.
- 1.6 **Aparat Pengawas Intern Pemerintah** atau pengendali internal yang selanjutnya disebut **APIP** adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
- 1.7 **Penyedia Barang/Jasa Pemerintah** yang selanjutnya disebut **Penyedia** adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
- 1.8 **Sub penyedia** adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
- 1.9 **Kemitraan** adalah kerja sama usaha antar penyedia dalam bentuk konsorsium/kerja sama operasi/bentuk kerja sama lain yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.
- 1.10 **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut **Jaminan** adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/ Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.
- 1.11 **Kontrak Pengadaan Barang/Jasa** yang selanjutnya disebut **kontrak** adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Penandatangan Kontrak dengan Penyedia.

- 1.12 **Bagian Kontrak** adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan. Penyelesaian masing-masing pekerjaan yang tercantum pada bagian kontrak tersebut tidak tergantung satu sama lain dan memiliki fungsi yang berbeda, dimana fungsi masing-masing bagian kontrak tersebut tidak terkait satu sama lain.
- 1.13 **Nilai Kontrak** adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.14 **Hari** adalah hari kalender, kecuali disebutkan secara eksplisit sebagai hari kerja.
- 1.15 **Harga Perkiraan Sendiri** yang selanjutnya disingkat **HPS** adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.
- 1.16 **Pekerjaan utama** adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya hasil pekerjaan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.
- 1.17 **Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan** adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 1.18 **Metode pelaksanaan pekerjaan** adalah cara kerja yang layak, realistik dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistematis berdasarkan sumber daya yang dimiliki Penyedia.
- 1.19 **Personel inti** adalah orang yang ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.
- 1.20 **Jadwal waktu pelaksanaan** adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan.
- 1.21 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak.
- 1.22 **Tanggal mulai kerja** adalah tanggal Penyedia mulai bekerja yang sama dengan tanggal penandatanganan SPMK yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 1.23 **Tanggal penyelesaian pekerjaan** adalah tanggal penyerahan pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita acara serah terima hasil pekerjaan yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia.

2. Penerapan

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan Jasa Lainnya ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Kontrak.

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Bahasa dan Hukum | <p>3.1 Bahasa kontrak dan bahasa korespondensi harus dalam bahasa Indonesia.</p> <p>3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.</p> |
| 4. Perbuatan yang dilarang dan Sanksi | <p>4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, Para Pihak dilarang untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini; dan/atau b. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini. <p>4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota Kemitraan) dan sub penyediaanya (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada klausul 4.1.</p> <p>4.3 Penyedia yang menurut penilaian Pejabat Penandatangan Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan diatas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemutusan Kontrak; b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor sebagaimana ditetapkan dalam SSKK; dan c. Dikenakan Sanksi Daftar Hitam. <p>4.4 Pengenaan sanksi administratif diatas dilaporkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak kepada PA/KPA.</p> <p>4.5 Pejabat Penandatangan Kontrak yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> |
| 5. Korespondensi | Semua pemberitahuan, permohonan, persetujuan, dan/atau korespondensi lainnya harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan kepada Para Pihak atau wakil sah Para Pihak jika telah disampaikan secara langsung, disampaikan melalui surat tercatat, <i>e-mail</i> , dan/atau faksimili sebagaimana tercantum dalam SSKK. |
| 6. Wakil Sah Para Pihak | Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk Penyedia perorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan. |
| 7. Perpajakan | Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan personel yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak. |
| 8. Pengalihan dan/atau Subkontrak | <p>8.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (<i>merger</i>), konsolidasi, atau pemisahan.</p> <p>8.2 Penyedia dapat bekerja sama dengan pelaku usaha lain antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan, kecuali pekerjaan utama dalam kontrak ini sebagaimana diatur dalam SSKK.</p> <p>8.3 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.</p> |

8.4 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam SSKK.

9. **Pengabaian** Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak atau Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.
10. **Penyedia Mandiri** Penyedia berdasarkan kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap personel dan subkontraktornya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh personel dan subpenyediaanya.
11. **Kemitraan** Kemitraan memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian Kemitraan untuk bertindak untuk dan atas nama Kemitraan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan Kontrak.

B. PELAKSANAAN KONTRAK

12. **Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan**
- 12.1 Kontrak ini berlaku sejak tanggal penandatanganan.
- 12.2 Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah jangka waktu yang ditentukan dalam SSKK.
13. **Penyerahan Lokasi Kerja (apabila diperlukan)**
- 13.1 Pejabat Penandatangan Kontrak menyerahkan keseluruhan lokasi kerja kepada penyedia sebelum SPMK diterbitkan. Sebelum penyerahan lokasi kerja, dilakukan pemeriksaan lapangan bersama yang dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lokasi Kerja.
- 13.2 Jika dalam pemeriksaan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam addendum Kontrak.
- 13.3 Jika penyerahan hanya dilakukan pada bagian tertentu dari lokasi kerja maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat dianggap telah menunda pelaksanaan pekerjaan tertentu yang terkait dengan bagian lokasi kerja tersebut, dan kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi serta dibuat Berita Acara.
- 13.4 Penyerahan lokasi kerja dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Lokasi Kerja yang ditandatangani oleh para pihak.
14. **Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)**
- 14.1 Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak, kecuali apabila anggaran belum berlaku.
- 14.2 Tanggal penandatanganan SPMK oleh Pejabat Penandatangan Kontrak ditetapkan sebagai tanggal mulai berlaku efektif Kontrak.
15. **Program Mutu (apabila diperlukan)**
- 15.1 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 15.2 Program mutu disusun oleh Penyedia paling sedikit berisi:
- a. Service Level Commitment (SLC);
 - b. organisasi kerja Penyedia;
 - c. Tahapan Tata Cara Pengaturan Pelaksanaan Pekerjaan;
 - d. jadwal pelaksanaan pekerjaan;

- 15.3 Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lapangan.
 - 15.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi adendum Kontrak dan Peristiwa Kompensasi.
 - 15.5 Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapatkan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak.
 - 15.6 Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia.
- 16. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak**
- 16.1 Pejabat Penandatangan Kontrak bersama dengan Penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.
 - 16.2 Hal-hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak meliputi:
 - a. review kontrak, dan pembagian tugas dan tanggung jawab dari kedua belah pihak;
 - b. pemutakhiran/pembaharuan rencana pekerjaan seperti tanggal efektif pelaksanaan, dan tahapan pelaksanaan kontrak;
 - c. revaluasi rencana penilaian kinerja pekerjaan sebagai dasar melakukan evaluasi kemajuan pekerjaan;
 - d. diskusi bagaimana dan kapan dilakukan pelaporan pekerjaan;
 - e. Tata cara, waktu dan frekuensi pengukuran dan pelaporan yang disesuaikan dengan kondisi pekerjaan;
 - f. melakukan klarifikasi hal-hal yang masih kurang jelas dan mendiskusikan prosedur untuk manajemen perubahan; dan
 - g. melakukan klarifikasi rencana koordinasi antar para pihak selama pelaksanaan pekerjaan.
 - 16.3 Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.
- 17. Pengawasan/ Pengendalian Pelaksanaan Pekerjaan**
- 17.1 Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak jika dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan dan Tim Teknis yang berasal dari personel Pejabat Penandatangan Kontrak. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
 - 17.2 Tim Teknis berasal dari unit kerja instansi yang terkait dan/atau tenaga profesional.
 - 17.3 Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
 - 17.4 Tim Teknis berkewajiban untuk membahas dan menilai pelaksanaan pekerjaan.
 - 17.5 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan Pejabat Penandatangan Kontrak. Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak.
 - 17.6 Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak inidn saran atau rekomendasi dari Tim Teknis.

- | | |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18. Persetujuan Pengawas Pekerjaan (Apabila diperlukan) | <p>18.1 Semua gambar yang digunakan untuk mendapatkan hasil pekerjaan baik yang permanen maupun sementara harus mendapatkan persetujuan Pengawas Pekerjaan.</p> <p>18.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu adanya hasil pekerjaan sementara maka Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan hasil pekerjaan sementara tersebut untuk disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. Terlepas dari ada tidaknya persetujuan Pengawas Pekerjaan, Penyedia bertanggung jawab secara penuh atas rancangan hasil pekerjaan sementara.</p> |
| 19. Akses ke Lokasi Kerja | <p>Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses Pejabat Penandatangan Kontrak, Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak, Tim Teknis, dan/atau Pengawas Pekerjaan ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.</p> |
| 20. Mobilisasi peralatan dan personel (Apabila diperlukan) | <p>20.1 Mobilisasi paling lambat dilaksanakan sesuai waktu yang ditetapkan dalam SSKK.</p> <p>20.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mendatangkan bahan/material dan peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan; b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau c. mendatangkan personel. <p>20.3 Mobilisasi bahan/material, peralatan dan personel dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.</p> |
| 21. Pemeriksaan Bersama | <p>21.1 Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, para pihak bersama-sama melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap tahapan pekerjaan dan rencana mata pembayaran.</p> <p>21.2 Untuk pemeriksaan bersama ini, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat dibantu Tim Teknis.</p> <p>21.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum Kontrak.</p> <p>21.4 Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa personel dan/atau peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan Kontrak maka Penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat personel dan/atau peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama.</p> |
| 22. Pemeriksaan dan/atau Pengujian | <p>22.1 Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian atas hasil pekerjaan untuk memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam Kontrak.</p> <p>22.2 Pemeriksaan dan/atau pengujian dapat dilakukan sendiri oleh penyedia dan disaksikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau diwakilkan kepada pihak ketiga sebagaimana diatur dalam SSKK.</p> <p>22.3 Pemeriksaan dan/atau Pengujian dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SSKK.</p> <p>22.4 Biaya pemeriksaan dan/atau pengujian telah termasuk pada nilai Kontrak.</p> |

- 22.5 Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan di tempat yang ditentukan dalam SSKK, dan dihadiri oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait. Penyedia berkewajiban untuk memberikan akses kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait tanpa biaya. Jika pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan di luar Tempat Tujuan Akhir maka semua biaya kehadiran Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait merupakan tanggungan Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 22.6 Jika hasil pemeriksaan dan/atau pengujian tidak sesuai dengan jenis dan mutu hasil pekerjaan yang ditetapkan dalam Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk menolak hasil pekerjaan tersebut dan Penyedia atas biaya sendiri berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti hasil pekerjaan tersebut.
- 22.7 Atas pelaksanaan pemeriksaan dan/atau pengujian yang terpisah dari serah terima hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait dan Penyedia.
- 23. Waktu Penyelesaian Pekerjaan**
- 23.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SSKK.
- 23.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau bukan Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka penyedia dikenakan denda keterlambatan.
- 23.3 Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam klausul ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.
- 24. Peristiwa Kompensasi**
- Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
- a. Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - b. keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
 - c. Pejabat Penandatangan Kontrak menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/ penyimpangan;
 - d. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi, dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - e. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
 - f. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaaan pelaksanaan pekerjaan; atau
 - g. ketentuan lain dalam SSKK.
- 25. Perpanjangan Waktu**
- 25.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal Penyelesaian maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pejabat / Penandatangan Kontrak dapat meminta pertimbangan Pengawas Pekerjaan/Tim Teknis (apabila ada) dalam memutuskan perpanjangan Tanggal Penyelesaian Pekerjaan.
- 25.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

- 25.3 Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dapat dibuktikan dibutuhkan penambahan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 25.4 Penyedia tidak berhak atas perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan pemberitahuan dini dalam mengantisipasi/mengatasi dampak Kompensasi.
- 25.5 Pejabat Penandatangan Kontrak menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam SSKK setelah Penyedia meminta perpanjangan.
- 25.6 Perpanjangan tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum/perubahan Kontrak.
- 26. Pemberian Kesempatan**
- 26.1 Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
- 26.2 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada klausul 26.1, dimuat dalam adendum/perubahan Kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.
- 26.3 Jangka waktu pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan diatur dalam SSKK.

C. PENYELESAIAN KONTRAK

- 27. Serah Terima Pekerjaan**
- 27.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk serah terima hasil pekerjaan.
- 27.2 Serah terima hasil pekerjaan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 27.3 Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Pengawas Pekerjaan dan/atau Tim Teknis.
- 27.4 Pemeriksaan hasil pekerjaan dilakukan dengan menilai kesesuaian pekerjaan yang diserahkan yang tercantum dalam Kontrak.
- 27.5 Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk memeriksa kebenaran ruang lingkup, spesifikasi, dan/atau hasil pekerjaan dan membandingkan kesesuaiannya dengan Kontrak.
- 27.6 Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serah terima pekerjaan jika hasil pemeriksaan pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak.
- 27.7 Atas pelaksanaan serah terima hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani bersama dengan Penyedia.

- 27.8 Dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serah terima Pekerjaan maka dibuat Berita Acara Penolakan Serah Terima dan segera memerintahkan kepada Penyedia untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
- 27.9 Jika pengoperasian hasil pekerjaan memerlukan keahlian khusus maka sebelum pelaksanaan serah terima pekerjaan Penyedia berkewajiban untuk melakukan pelatihan (jika dicantumkan dalam kontrak). Biaya pelatihan termasuk dalam Nilai Kontrak.
- 27.10 Pejabat Penandatangan Kontrak menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan yang diserahkan sesuai dengan Kontrak.
- 27.11 Jika hasil pekerjaan yang diserahkan terlambat melewati batas waktu akhir kontrak karena kesalahan atau kelalaian Penyedia atau bukan akibat Keadaan Kahar maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.
- 28. Jaminan bebas Cacat Mutu/ Garansi (apabila diperlukan)**
- 28.1 Penyedia berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, hasil pekerjaan tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- 28.2 Jaminan bebas cacat mutu/garansi ini berlaku sampai dengan yang tertera dalam spesifikasi.
- 28.3 Pejabat Penandatangan Kontrak menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Kontrak.
- 28.4 Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi hasil pekerjaan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- 28.5 Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi hasil pekerjaan akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka Pejabat Penandatangan Kontrak akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan Pejabat Penandatangan Kontrak secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak akan melakukan perbaikan, penggantian, dan/atau melengkapi hasil pekerjaan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi hasil pekerjaan tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dari nilai tagihan atau jaminan pelaksanaan Penyedia.
- 28.6 Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai dalam memperbaiki cacat mutu dikenakan sanksi Daftar Hitam.
- 29. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan (apabila diperlukan)**
- Apabila diperlukan, Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada Pejabat Penandatangan Kontrak tentang pedoman pengoperasian dan perawatan sebelum serah terima hasil pekerjaan.

D. PERUBAHAN KONTRAK

- 30. Perubahan Kontrak**
- 30.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum/perubahan Kontrak.
- 30.2 Adendum/perubahan Kontrak dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen Kontrak dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
- a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - d. mengubah jadwal pelaksanaan.
- 30.3 Selain adendum/perubahan Kontrak yang diatur pada klausul 30.2, addendum/perubahan Kontrak dapat dilakukan untuk hal-hal yang disebabkan masalah administrasi, antara lain pergantian Pejabat Penandatanganan Kontrak, perubahan rekening Penyedia, dan sebagainya.
- 30.4 Pekerjaan tambah paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari nilai Kontrak awal dan harus mempertimbangkan tersedianya anggaran.
- 30.5 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.
- 30.6 Hasil negosiasi teknis dan harga tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum/perubahan Kontrak.
- 30.7 Perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
- a. peristiwa kompensasi; dan/atau
 - b. Keadaan Kahar.
- 30.8 Dalam hal keadaan kahar waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya pelaksanaan Kontrak akibat Keadaan Kahar.
- 30.9 Dalam hal peristiwa kompensasi, waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang paling lama sama dengan waktu terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak akibat peristiwa kompensasi.
- 30.10 Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat menyetujui secara tertulis perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan yang diajukan oleh Penyedia.
- 30.11 Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat menugaskan pengawas pekerjaan atau tim teknis untuk meneliti kelayakan/kewajaran perpanjangan waktu pelaksanaan.
- 30.12 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam adendum/perubahan Kontrak.
- 31. Keadaan Kahar**
- 31.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

- 31.2 Yang termasuk Keadaan Kahar tidak terbatas pada:
- a. Bencana alam;
 - b. Bencana non alam;
 - c. Bencana sosial;
 - d. Pemogokan;
 - e. Kebakaran;
 - f. Kondisi cuaca ekstrim; dan/atau
 - g. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri teknis terkait.
- 31.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Penyedia memberitahukan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan bukti.
- 31.4 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.
- 31.5 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan:
- a. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan audit.
 - b. Jika selama masa Keadaan Kahar Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam addendum/perubahan Kontrak.
- 31.6 Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cedera janji atau wanprestasi, jika kegagalan tersebut diakibatkan oleh keadaan kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar:
- a. telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan
 - b. telah memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan terjadinya peristiwa yang menyebabkan terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak.
- 31.7 Keterlambatan pengadaan akibat Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- 31.8 Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dituangkan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.
- 31.9 Penghentian Kontrak karena Keadaan Kahar dapat bersifat:
- a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
 - b. permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/ diselesaikannya pekerjaan.
- 31.10 Penghentian pekerjaan akibat Keadaan Kahar tetap mempertimbangkan efektifitas pekerjaan dan tahun anggaran.

E. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

- 32. Penghentian Kontrak** Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada klausul 31.
- 33. Pemutusan Kontrak**
- 33.1 Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia.
- 33.2 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Penyedia tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.
- 33.3 Penyedia dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.
- 33.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah Pejabat Penandatangan Kontrak/Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 34. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak**
- 34.1 Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:
- a. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
 - b. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
 - c. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatangan Kontrak;
 - e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
 - g. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - h. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam SSKK, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - i. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam SSKK, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau
 - j. Penyedia menghentikan pekerjaan melebihi waktu yang ditentukan dalam SSKK dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan (apabila ada).
- 34.2 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak sebagaimana dimaksud pada klausul 34.1, maka:
- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan; dan
 - b. Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

- 34.3 Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi milik Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 35. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia**
- 35.1 Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak apabila:
- Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia secara tertulis untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK; atau
 - Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan jangka waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.
- 35.2 Dalam hal pemutusan Kontrak maka Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi milik Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 36. Berakhirnya Kontrak**
- 36.1 Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.
- 36.2 Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud pada klausul 36.1 adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak.
- 37. Peninggalaan**
- Semua Bahan, Perlengkapan, Peralatan, Hasil Pekerjaan Sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh Pejabat Penandatangan Kontrak tanpa kewajiban perawatan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan Pejabat Penandatangan Kontrak.

F. PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

- 38. Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatangan Kontrak**
- 38.1 Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai hak:
- mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - meminta laporan-laporan yang tercantum di dalam kontrak mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - menerima hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak.
 - mengenakan sanksi kepada Penyedia;
 - memberikan instruksi;
 - mengusulkan pengenaan sanksi daftar hitam;
 - menyetujui adendum/perubahan kontrak;
 - menerima jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, dan jaminan pemeliharaan (apabila ada); dan/atau
 - menilai kinerja Penyedia.

- 38.2 Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai kewajiban:
- a. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. membayar uang muka (Apabila dipersyaratkan);
 - c. membayar ganti rugi karena kesalahan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak; dan
 - d. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.

G. PENYEDIA

- 39. Hak dan Kewajiban Penyedia**
- 39.1 Penyedia mempunyai hak:
- a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak; dan
 - b. memperoleh fasilitas dari Pejabat Penandatangan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak.
- 39.2 Penyedia mempunyai Kewajiban:
- a. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - b. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - c. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam Kontrak;
 - d. memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - e. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal dan tempat penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - f. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia; dan
 - g. menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*).
- 40. Tanggung Jawab** Penyedia bertanggungjawab/berkewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kualitas, ketepatan volume, ketepatan waktu pelaksanaan/penyerahan dan ketepatan tempat pengiriman/penyerahan hasil pekerjaan.
- 41. Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi** Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan izin tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 42. Hak Atas Kekayaan Intelektual** Penyedia berkewajiban untuk melindungi Pejabat Penandatangan Kontrak dari segala tuntutan atau klaim dari pihak lain atas pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual.
- 43. Penanggungan dan Risiko**
- 43.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatangan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung

- sejak tanggal SPMK sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima:
- a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, SubPenyedia (jika ada), dan Personel;
 - b. cedera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
 - c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- 43.2 Terhitung sejak tanggal SPMK sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan, bahan dan perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 43.3 Pertanggungjawaban asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- 43.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan yang terjadi sejak tanggal SPMK diterbitkan sampai batas akhir Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana diatur dalam SSKK harus diperbaiki, diganti, dan/atau dilengkapi oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.
- 44. Perlindungan Tenaga Kerja (apabila diperlukan)**
- 44.1 Penyedia dan SubPenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan personelnnya pada program jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 44.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personelnnya untuk mematuhi ketentuan mengenai keselamatan kerja sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan.
- 44.3 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap personelnnya (termasuk personel SubPenyedia, jika ada), perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.
- 44.4 Tanpa mengurangi kewajiban penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia melaporkan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.
- 45. Pemeliharaan Lingkungan**
- Penyedia berkewajiban mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak lain dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.
- 46. Asuransi Khusus dan Pihak Ketiga**
- 46.1 Apabila dipersyaratkan dalam SSKK, Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pekerjaan untuk:
- a. semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga; dan
 - b. pihak lain sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya.
- 46.2 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam nilai Kontrak.

47. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak	<p>Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pejabat Penandatanganan Kontrak sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan; dan/atau b. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
48. Kerjasama Penyedia dengan Usaha Kecil sebagai SubPenyedia	<p>48.1 Penyedia dapat bekerjasama dengan usaha kecil dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.</p> <p>48.2 Bagian Pekerjaan yang wajib disubkontrakkan oleh Penyedia kepada usaha kecil sebagai SubPenyedia diatur di dalam SSKK.</p> <p>48.3 Dalam kerjasama di atas, Penyedia bertanggung jawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut.</p> <p>48.4 Penyedia membuat laporan mengenai pelaksanaan subkontrak.</p>
49. Penggunaan lokasi kerja (apabila ada)	<p>Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja bersama-sama dengan Penyedia lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memberikan jadwal kerja Penyedia yang lain di lokasi kerja.</p>
50. Keselamatan	<p>Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak di lokasi kerja (apabila ada).</p>
51. Sanksi Finansial	<p>51.1 Sanksi finansial bagi Penyedia dapat berupa sanksi ganti rugi, denda keterlambatan atau pencairan jaminan.</p> <p>51.2 Sanksi ganti rugi bagi Penyedia dikenakan apabila jaminan tidak dapat dicairkan, terjadi kesalahan dalam perhitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.</p> <p>51.3 Sanksi denda keterlambatan bagi Penyedia dikenakan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan dengan cara memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.</p> <p>51.4 Sanksi pencairan jaminan pelaksanaan bagi Penyedia dikenakan apabila Penyedia tidak menyelesaikan pekerjaan setelah berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan atau dilakukan pemutusan kontrak.</p>
52. Jaminan	<p>52.1 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak sebelum penandatanganan Kontrak.</p> <p>52.2 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan.</p> <p>52.3 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen).</p>
53. Laporan Hasil Pekerjaan	<p>53.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atas kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.</p>

- 53.2 Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian, dibuat laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan.
- 53.3 Laporan dibuat oleh Penyedia, apabila diperlukan pemeriksaan dilakukan oleh unsur pengawas (apabila ada) dan disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 54. **Kepemilikan Dokumen**
 - 54.1 Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan milik Pejabat Penandatangan Kontrak.
 - 54.2 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen beserta daftar rinciannya kepada Pejabat Penandatangan Kontrak paling lambat pada saat serah terima pekerjaan atau waktu pemutusan Kontrak.
 - 54.3 Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen tersebut di atas dengan batasan penggunaan diatur dalam SSKK.
- 55. **Personel dan/atau Peralatan (apabila dipersyaratkan)**
 - 55.1 Personel dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.
 - 55.2 Penggantian Personel tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak.
 - 55.3 Penggantian Personel dilakukan oleh Penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Pejabat Penandatangan Kontrak beserta alasan penggantian.
 - 55.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian Personel menurut kualifikasi yang dibutuhkan.
 - 55.5 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta pergantian Personel apabila menilai bahwa Personel:
 - a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
 - b. berkelakuan tidak baik; atau
 - c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya.
 - 55.6 Jika penggantian Personel perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari Personel yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
 - 55.7 Personel berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya.

H. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

- 56. **Nilai Kontrak**
 - 56.1 Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak sebesar nilai kontrak atau berdasarkan hasil perhitungan akhir.
 - 56.2 Untuk Kontrak Harga Satuan atau *item* pekerjaan dengan harga satuan pada Kontrak Gabungan Lumsom dan Harga Satuan, rincian nilai kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

Handwritten signature/initials

57. Pembayaran

- 57.1 Prestasi pekerjaan
- a. pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.
 - b. pembayaran prestasi hasil pekerjaan dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pengecualian untuk:
 - a) Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dibayar terlebih dahulu sebelum Barang/Jasa diterima;
 - b) pembayaran bahan/material dan/atau peralatan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan yang telah berada di lokasi pekerjaan dan dicantumkan dalam kontrak namun belum terpasang; atau
 - c) pembayaran pekerjaan yang belum selesai 100% (seratus persen) pada saat batas akhir pengajuan pembayaran dengan menyerahkan jaminan atas pembayaran.
 - 3) pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan diterima/terpasang;
 - 3) pembayaran dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada) dan pajak.
 - c. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah hasil pekerjaan dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima hasil pekerjaan dan bilamana dipersyaratkan dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba.
 - d. Pembayaran dengan L/C mengikuti ketentuan umum yang berlaku di bidang perdagangan.

57.2 Sanksi Finansial

Sanksi finansial dapat berupa sanksi ganti rugi atau denda keterlambatan;

a. Ganti Rugi

Sanksi ganti rugi bagi Penyedia apabila terbukti jaminan yang tidak bisa dicairkan, terjadi kesalahan dalam perhitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan sebagaimana diatur dalam SSKK

b. Denda keterlambatan

besarnya denda yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah sebagaimana yang ditetapkan di dalam SSKK.

58. Perhitungan Akhir

- 58.1 Untuk Kontrak Harga Satuan atau *item* pekerjaan dengan harga satuan pada Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, perhitungan akhir nilai pekerjaan berdasarkan volume pekerjaan yang telah diselesaikan 100% (seratus persen) dan dituangkan dalam Adendum Kontrak (apabila ada).
- 58.2 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak. Pembayaran akhir tahun mengacu pada Peraturan Dirjen Perbendaharaan Negara tentang Pembayaran Akhir Tahun.

59. Penangguhan Pembayaran

- 59.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajibannya.

- 59.2 Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
- 59.3 Pembayaran yang ditangguhkan disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia.
- 59.4 Jika dipandang perlu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia.

I. PENGAWASAN MUTU

- 60. **Pengawasan dan Pemeriksaan**

Pejabat Penandatangan Kontrak berhak melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Apabila diperlukan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.
- 61. **Penilaian Pekerjaan Sementara oleh Pejabat Penandatangan Kontrak**
 - 61.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dalam masa pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.
 - 61.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan pekerjaan.
- 62. **Cacat Mutu**

Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan Penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak.
- 63. **Pengujian**

Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) memerintahkan Penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan apabila hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka Penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.
- 64. **Perbaikan Cacat Mutu**
 - 64.1 Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas Cacat Mutu selama Masa Kontrak.
 - 64.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.
 - 64.3 Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka:
 - a. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutus kontrak secara sepihak dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana pada klausul 35.2; atau

- b. Pejabat Penandatanganan Kontrak berhak untuk secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima permintaan penggantian biaya/klaim dari Pejabat Penandatanganan Kontrak secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (apabila ada) atau biaya penggantian diperhitungkan sebagai hutang penyedia kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak yang telah jatuh tempo.

64.4 Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat mengenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu.

J. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

65. Itikad Baik

- 65.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.
- 65.2 Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia setuju untuk melaksanakan Kontrak dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.
- 65.3 Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.
- 65.4 Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak.

66. Penyelesaian Perselisihan

- 66.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini secara musyawarah dan damai.
- 66.2 Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan damai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase atau litigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 66.3 Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP, Lembaga Arbitrase atau Pengadilan Negeri.
- 66.4 Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia bersama-sama memilih dan menetapkan tempat penyelesaian sengketa dan dicantumkan dalam SSKK.

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

Klausul dalam SSUK	No. SSUK	Pengaturan dalam SSKK
4. Perbuatan yang dilarang dan Sanksi	4.3.b	Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor ke Kas Negara
5. Korespondensi	Alamat Para Pihak sebagai berikut:	
	Satuan Kerja Pejabat Penandatangan Kontrak: Nama : Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan RI Alamat : Gedung Adhyatma Blok B Ruang 409 Jalan HR Rasuna Said Blok X5 Kav 4-9 Jakarta Selatan (12950) Telepon : (021) 5279516 Faksimili : (021) 5279516 Penyedia: Nama : Kemitraan TELKOM-INFOMEDIA Alamat : Menara Multimedia Jalan Kebon Sirih No. 12 Jakarta Pusat Telepon : (021) 80675600 Faksimili : (021) 3845933	
6. Wakil Sah Para Pihak	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:	
	Untuk Pejabat Penandatangan Kontrak	: dr. Asral Hasan, MPH
	Untuk Penyedia	: Mohammad Salsabil
	Pengawas Pekerjaan	: Haidar Istiqlal, S.Kom sebagai wakil sah Pejabat Penandatangan Kontrak
8. Pengalihan dan/atau Subkontrak	8.4	Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak: dikenakan sanksi dilakukan pemutusan kontrak.
12. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	12.2	Masa berlangganan Layanan selama 10 (Sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan 31 Desember 2020. Penyedia menjamin keberlangsungan layanan sampai ditetapkannya pemenang pada lelang berikutnya.
20. Mobilisasi peralatan dan personel	20.1	Mobilisasi atau Instalasi sarana prasarana dan infrastruktur baik yang ada di Pusat Komando Nasional (NCC) Call Center 119 maupun PSC 119 di daerah dikerjakan paling lambat 60 (Enam Puluh) hari kalender sejak diterimanya SPMK.
22. Pemeriksaan dan Pengujian	22.2	Pemeriksaan dan pengujian dilaksanakan oleh Tim Teknis Kementerian Kesehatan yang disaksikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak. Bila diperlukan, penyedia menghadirkan teknisi dari pekerjaan tersebut.
	22.3	Pemeriksaan dan pengujian yang dilaksanakan meliputi: Ruang Lingkup Pekerjaan.

	22.5	Pemeriksaan dan pengujian dilaksanakan di: Pusat Komando Nasional (NCC) Call Center 119 Jl. Percetakan Negara No. 29 Jakarta Pusat.
25. Perpanjangan Waktu	25.5	Pejabat Penandatangan Kontrak menetapkan perpanjangan waktu paling lambat dalam 14 (Empat Belas) Hari Kalender setelah Penyedia meminta perpanjangan.
26. Pemberian Kesempatan	26.3	Jangka waktu pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan selama 50 (Lima Puluh) hari kalender setelah masa kontrak berakhir.
27. Serah Terima Pekerjaan	27.2	Serah terima dilakukan pada: Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan RI.
34. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak	34.1.j	Penghentian pekerjaan oleh Penyedia paling lama 14 (Empat Belas) hari kalender tanpa persetujuan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
35. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia	35.1.a	Batas waktu penundaan pelaksanaan pekerjaan paling lama 14 (Empat Belas) hari kalender.
	35.1.b	Batas waktu untuk penerbitan Surat Perintah Pembayaran paling lama 14 (Empat Belas) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
38. Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatangan Kontrak	38.2.d	Pejabat Penandatangan Kontrak akan memberikan fasilitas berupa: <ul style="list-style-type: none"> a. Daftar kontak person penanggungjawab NCC dan PSC yang diperlukan dalam layanan ini; b. Jaminan ketersediaan ruangan, kestabilan dan pemakaian listrik dan air; c. Fasilitas lain yang disepakati para pihak untuk kelancaran layanan Pusat Komando Nasional SPGDT <i>Call Center</i> 119.
43. Penanggungan dan Risiko	43.4	Sub butir ini tidak digunakan (Tidak ada Masa Pemeliharaan).
46. Asuransi Khusus dan Pihak Ketiga	46.1	Tidak dipersyaratkan.
47. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak	47.b	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak adalah: <ul style="list-style-type: none"> a. menunjuk personil baru dengan mempertimbangkan kualifikasi yang tercantum dalam Lampiran SSKK; b. mengubah daftar PSC yang akan diintegrasikan; c. mengubah atau memutakhirkan program mutu; d. mengubah layout ruangan layanan <i>Call Center</i> 119;
48. Kerjasama Penyedia dengan Usaha Kecil Sebagai SubPenyedia	48.2	Bagian Pekerjaan yang wajib dikerjasamakan dengan usaha kecil: Tidak Ada

52. Jaminan

Jaminan Pelaksanaan No. MBG666088657820N tanggal 02 Maret 2020 sebesar Rp536.645.010,00 (Lima Ratus Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Sepuluh Rupiah), dan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

53. Laporan Hasil Pekerjaan

Penyedia Jasa berkewajiban untuk menyampaikan laporan-laporan berikut secara periodik bulanan selama Masa Kontrak paling lambat **hari kelima** pada bulan berikutnya.

Laporan Bulanan Hasil Pekerjaan yang terdiri dari :

1. Jenis, jumlah, dan kondisi perangkat pendukung layanan Pusat Komando Nasional SPGDT Call Center 119;
2. Utilisasi penggunaan Koneksi untuk pendukung layanan Pusat Komando Nasional SPGDT Call Center 119;
3. Rekapitulasi Call;
4. Presensi Kehadiran Personil NCC 119;
5. Pemenuhan Service Level Commitment (SLC) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Perangkat dan konektivitas sebesar 98%.
 - b. QM Score yaitu kualitas pelayanan agen yang terdiri atas solusi, proses dan sikap melayani sebesar 90%
 - c. Successful Call Ratio adalah perbandingan telepon yang diterima dengan total telepon masuk sebesar 95%

54. Kepemilikan Dokumen

54.3

Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Jasa Lainnya ini dengan pembatasan sebagai berikut: hanya selama masa kontrak dan harus tetap menjaga kerahasiaan.

57. Pembayaran

57.1.a

1. Kontrak Pengadaan Jasa Lainnya ini dibiayai dari APBN DIPA Nomor : DIPA-024.04.1.465791/2020 Tanggal 12 November 2019 Tahun Anggaran 2020 Satuan Kerja Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan.
2. Jasa Lainnya ini tidak diberikan uang muka.
3. Pembayaran sesuai prestasi pekerjaan termasuk PPN 10% kepada Penyedia dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pembayaran instalasi untuk 26 PSC baru sebesar Rp352.891.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah). Dibayarkan bersamaan dengan pembayaran bulanan pada sewa layanan bulan April 2020.
 - b. Pembayaran layanan dilakukan secara bulanan selama 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak bulan Maret s.d Desember 2020 maksimal sebesar Rp943.637.200,00 (Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah) Perbulan.
2. Pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan langsung ke rekening Penyedia pada :

Nama Bank : Bank Mandiri
Cabang : Jakarta Sabang
Rekening : 103.000.691.7989
Atas Nama : Telekomunikasi Indonesia

3. Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:
 - a. Instalasi PSC Baru : Berita Acara Uji Jaringan dan Layanan Integrasi PSC di 26 Lokasi
 - b. Layanan Pusat Komando Nasional SPGDT *Call Center* 119 : Berita Acara (BA) Performansi Layanan dan Laporan Layanan pada bulan yang ditagihkan yang ditanda tangani oleh pengguna Sub Direktorat Pelayanan Gawat Darurat Terpadu

57.2.a

Ganti rugi

Besar ganti rugi akibat jaminan pelaksanaan tidak bisa dicairkan yaitu sebesar 5% (Lima persen) dari nilai Kontrak.

Service Level Commitment (SLC) yang dijaminakan adalah sebagai berikut :

- a. Perangkat dan konektivitas sebesar 98%.
- b. QM Score yaitu kualitas pelayanan agen yang terdiri atas solusi, proses dan sikap melayani sebesar 90%
- c. Successful Call Ratio adalah perbandingan telepon yang diterima dengan total telepon masuk sebesar 95%

Besarnya restitusi untuk tidak tercapainya SLC :

Perangkat dan konektivitas, potongan biaya dihitung berdasarkan rumus :

$$\text{Restitusi} = ((A - A_v) / C) \times B$$

Dimana :

A = jumlah jam gangguan dalam bulan gangguan

$A_v = (100\% - \% \text{tingkat availability}) \times C$

B = Biaya sewa (per perangkat / per sistem) per bulan

C = Jumlah Jam dalam bulan gangguan

57.2.b

Denda Keterlambatan

Denda keterlambatan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Besarnya denda keterlambatan adalah: 1‰ (satu permil) per hari dari sisa harga Kontrak yang belum dikerjakan.

66. Penyelesaian Perselisihan

66.4

Dalam hal terdapat sengketa antara Pejabat Penandatanganan Kontrak dengan Penyedia, penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP.

nt

LAMPIRAN

I. LINGKUP PEKERJAAN

1. Lingkup pekerjaan merupakan penyediaan jasa sewa untuk menyanggarakan Pusat Komando Nasional SPGDT Call Center 119 Kementerian Kesehatan tahun 2020 dengan penyediaan jasa instalasi dan pengintegrasian PSC 119 Kabupaten / Kota Ke NCC 119.
2. Penyediaan sarana prasarana dan infrastruktur Pusat Komando Nasional SPGDT *Call Center* 119 meliputi *Komputer Desktop, Head set unit* dan perangkat *Call Center* lainnya.
3. Instalasi aplikasi call center 119 dan aplikasi SPGDT 119 di ruangan yang telah disediakan.
4. Melakukan integrasi sistem *call center* PSC 119 Kabupaten / Kota dengan *software call center* Pusat Komando Nasional 119 untuk menampilkan informasi operasional Pusat Komando Nasional SPGDT Call Center 119
5. Melakukan monitoring dan evaluasi integrasi sistem *call center* PSC 119 Kabupaten/Kota dengan *software call center* Pusat Komando Nasional 119.
6. Menjamin keberlangsungan pengintegrasian sistem call center PSC 119 Kabupaten / Kota dengan *software call center* Pusat Komando Nasional 119.
7. Menyediakan SDM yang terlatih sebagai petugas Pusat Komando Nasional 119 Kementerian Kesehatan RI.
8. Bertanggung jawab dalam manajemen Pusat Komando Nasional SPGDT Call Center 119 selama 24 jam, 7 hari dalam seminggu, secara terus menerus.
9. Membuat laporan tertulis setiap bulan mengenai proses kegiatan call center Pusat Komando Nasional 119 dan PSC 119 yang terintegrasi.
10. Waktu instalasi / pemasangan sarana prasarana dan infrastruktur baik yang di Pusat Komando Nasional Call Center 119 maupun PSC 119 di daerah dikerjakan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah ditandatangani Kontrak atau diterimanya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan telah dilakukan uji coba yang dinyatakan dengan berita acara ujicoba sebagai kelengkapan dalam serah terima pekerjaan.
11. Waktu pengintegrasian dengan 56 (lima puluh enam) PSC 119 ke Pusat Komando Nasional *Call Center* 119 terhitung mulai tanggal setelah selesainya uji fungsi sampai dengan 31 Desember 2020.
12. Dalam masa peralihan pemenang lainnya pada tahun berikutnya, penyedia tahun berjalan bersedia menjamin keberlangsungan layanan selama pemasangan atau instalasi jaringan baru. Terkait pembiayaan selama masa peralihan tersebut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) akan membayarkan biaya sewa bulanan kepada penyedia lama sesuai dengan kontrak penyedia lama dengan Pejabat Pembuat Komitmen dan atau melalui hasil verifikasi dari pembayaran Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan.
13. Waktu pemberian layanan Pusat Komando Nasional Call Center 119 sebagai pusat panggilan kegawatdaruratan medik kepada masyarakat harus dimulai pada 1 Maret 2020 sampai 31 Desember 2020 atau 10 (sepuluh) bulan waktu pelaksanaan efektif.
14. Pemeliharaan jaringan perangkat dan lainnya yang mendukung fungsi pelayanan Pusat Komando Nasional *Call Center* 119 menjadi tanggung jawab penyedia (TELKOM-INFOMEDIA).
15. Pusat Komando Nasional SPGDT Call Center 119 Kementerian Kesehatan RI ditempatkan di Jl. Percetakan Negara No.29 Jakarta Pusat.

II. SPESIFIKASI FUNGSIONAL

1. Memastikan tersedianya layanan Pusat Komando Nasional *Call Center* 119 yang terintegrasi dengan PSC 119 untuk meningkatkan mutu layanan kegawatdaruratan medik bagi masyarakat
2. Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Penyedia jasa harus memperhatikan kriteria umum penyediaan jasa sewa disesuaikan berdasarkan fungsi sistem komunikasi yang mampu mengintegrasikan Pusat Komando nasional SPGDT *Call Center* 119 dengan *Call Center* PSC 119 yang telah terselenggara di seluruh wilayah Indonesia.
3. Menjamin sistem Pusat Komando Nasional 119 yang akan dibangun dapat terkoneksi dengan sistem call center PSC 119 yang telah ada di beberapa wilayah di Indonesia.
4. Menjamin Pusat Komando Nasional *Call Center* 119 yang akan dibangun tetap dapat terkoneksi dengan sistem yang diselenggarakan tahun berikutnya tanpa menghentikan pelayanan Pusat Komando Nasional *Call Center* 119.
5. Menyediakan saluran panggilan telepon keluar untuk sarana telekomunikasi dan untuk antisipasi jika sambungan melalui sistem terkendala.
6. Menyediakan Aplikasi *Call Tracker* yang dapat dioperasikan (berfungsi) untuk identifikasi lokasi penelpon guna mendapatkan pertolongan cepat.
7. Menyediakan sistem yang dapat melakukan transfer data penelepon/pasien dari Pusat Komando SPGDT *Call Center* 119 ke PSC 119 secara *real time* perkasus
8. Menyediakan laporan dari layanan dari PSC 119 ke Pusat Komando SPGDT *Call Center* 119 secara *real time* yang dapat dipantau melalui *dashboard* monitoring Pusat Komando Nasional 119.
9. Menyediakan menu grafik laporan harian dan bulanan *real time* terhadap layanan di Pusat Komando Nasional 119 dan PSC 119 yang terintegrasi di *dashboard* monitoring.

III. SPESIFIKASI KINERJA

1. Melaksanakan dan mengelola panggilan kegawatdaruratan kesehatan selama 24 jam 7 hari seminggu secara terus menerus di wilayah Indonesia yang telah menyelenggarakan *Public Safety Center* 119.
2. Mengelola operasonalisasi layanan Pusat Komando Nasional *Call Center* 119 termasuk menjamin keberlangsungan layanan tanpa kendala dengan :
 - a. SLA 98% untuk perangkat dan jaringan / konektivitas
 - b. SLA 95% untuk SCR (Successfull Call Ratio)
 - c. SLA 90% untuk QM (Quality Management) Score yaitu kualitas pelayanan agen
3. Menyediakan sarana & prasarana pendukung layanan Pusat Komando Nasional SPGDT *Call Center* 119 termasuk Jaringan Telekomunikasi dengan jaringan cadangan (backup link) untuk memastikan terus tersedianya layanan
4. Melakukan integrasi dengan 56 (lima puluh enam) *Public Safety Center* (PSC) 119 terpilih dan siap mendukung Pusat Komandi Nasional SPGDT *Call Center* 119.

IV. SPESIFIKASI TEKNIS RUANG LINGKUP PEKERJAAN

No	Item	Unit	Spesifikasi yang Ditawarkan
1	License CC Elite Agent + Support	65 user	Agent Desktop (Lisence & Support): - Sign in/out agent
2	License Call Management System Agent + Support	9 user	Call Management system feature : - Analyze call flow - Match agent resources and skills
3	License Computer Telephony Integration (CTI) TSAPI	9 user	CTI Feature : - menampilkan Caller ID & collect digit
4	License Nice Voice recording	9 user	Recording (RPlayer) Feature : - multiple trigger of recording - search & playback
5	License Station Agent Inbound/Outbond + Support	9 user	Agent Desktop Feature (Lisence & Support): - AUX - Transfer, Hold, Conference
6	Layanan Hardware Core PABX / SIP Gateway / Media Gateway	1 Paket	Processor 6 Core 2.6 Ghz, HDD 1 TB OS Server ACD Feature : - Full Routing to agent, distribution skill based
7	Aplikasi Contact Center SPGDT	1 Paket	Reporting Call Center Agent Feature in NCC and PSC : - Agent monitoring: profiles caller, notes, status
8	Modul untuk System Call Tracker	1 Paket	System yang dapat menunjukkan lokasi penelpon ke call center 119, fitur : - Dispatch ke PSC - Menunjukkan lokasi penelpon berdasarkan sinyal BTS (di NCC dan penyedia yang bekerja sama)
9	PC Desktop (Min Memory 2 GB) & 2 M	13 unit	PC Desktop Intel Core minimal i3, 4GB DDR3, 500GB HDD, - Untuk agents, support, dan monitor dashboard dan display
10	Monitor Desktop	31 unit	Minimal 20", 1600 x 900, monitor splitter (3 monitor untuk 1 PC agents & support) dan 4 unit untuk monitor dashboard dan display
11	Monitor Splitter	9 unit	3 Port Display
12	Switch Hub based 24 Port Fast Ethernet	1 unit	24 Ports 10/100Mbps
13	Router support Multitude routing protocol dan L2 Forwarding	2 unit	CPU 680MHz, Memory 256 DDR SDRAM Data storage 512MB
14	Headset binaural	9 unit	Dual Tube USB with Voice Controller + Amplifier + Noise Cancel atau setara
15	Antivirus Licence	9 unit	Antivirus Enterprise atau setara
16	Server Aplikasi, Algoritma, Database, Call Tracker	4 unit	Minimal Gen 9 Intel Xeon ES-2620v3 6 Core 2.4 Ghz, RAM 16 GB, HDD 1,2 TB
17	Rack server - 42U	1 unit	Close rack 42U
18	UPS	1 unit	Minimal 3 KVA

No	Item	Unit	Spesifikasi yang Ditawarkan
19	Display Seamless	12 unit	Minimal 49 inch diagonal size, full HD resolution, image size 1039 X 548 mm, ratio 16:9, direct LED Backlight, multiscreen up to 5X5, auto operating setting, termasuk instalasi
20	Video Processor	2 unit	Computer system, 4 Graphic Card
21	LED TV Monitoring dashboard – 42 inch	10 unit	Minimal 42", 1920 x 1080 (Full HD), Triple XD Engine, 2 Channel Speaker System, Virtual Sound, HDMI, USB atau setara, include bracket untuk aplikasi integrase dan monitoring space
22	Workstation (Meja dan Kursi)	1 Paket	Meubelair terdiri dari 7 unit meja agen dan 7 kursi agen, dan 2 unit meja support dan 2 kursi support
23	CCTV	3 Unit	Dome Camera IR, waterproof
24	Air Conditioner	6 unit	Minimal 1 PK
25	Interkoneksi	1 Paket	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan SIP Trunk 2 unit 2. Akses Internet dedicated di lokasi Layanan NCC 119 dengan bandwidth sebesar 80 Mbps 1 unit 3. Layanan Hardware SBC dan connectivity 10 Mbps untuk voice 1 unit 4. Link Metro-E Call Tracker 10 Mbps 1 unit 5. Link Metro-E dari DC ke SIP Trunk 10 Mbps 1 unit 6. Link VPN IP 56 x1 Mbps (56 lokasi PSC) 7. Link Backbone VPN IP 45 Mbps 1 unit
26	Supporting Sistem		<ol style="list-style-type: none"> 1. Personil NCC 119 meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Agent call center 27 orang b. Supervisor Dokter 4 orang c. IT Person 4 orang 2. Melaksanakan operasional pemeliharaan perangkat secara periodik
27	Outbond call	1 paket	Menyediakan telepon keluar melalui sistem aplikasi SPGDT yang ada di setiap agent NCC 119

V. PERSONIL PUSAT KOMANDO NASIONAL 119

No	Kualifikasi
1	Supervisor/Penyelia (sistem kerja 24 jam) jumlah 4 orang dengan kualifikasi sebagai berikut : a. Pendidikan minimal dokter. b. Pengalaman sebagai dokter praktek perorangan/fasilitas pelayanan kesehatan minimal 2 tahun dan dibuktikan dengan surat keterangan tempat bekerja. c. Memiliki sertifikat kegawatdaruratan.
2	IT Suport (sistem kerja 24 jam) jumlah 4 orang dengan kualifikasi sebagai berikut : a. Pendidikan minimal S1 Teknik Komputer/Teknik Informatika/ Teknologi Informasi. b. Pengalaman sebagai IT Support minimal 2 tahun dan dibuktikan dengan surat keterangan tempat bekerja. c. Memiliki Sertifikat CCNA atau <i>Information Technology Infrastructure Library</i> (ITIL)
3	Operator/Agent <i>National Command Center</i> (sistem kerja 24 jam) jumlah 27 orang dengan kualifikasi sebagai berikut : a. Pendidikan minimal D3 Keperawatan/Kebidanan b. Terlatih operator <i>Call Center</i> (menunjukan sertifikat pelatihan). c. Pengalaman sebagai Operator/Petugas <i>Call Center</i> minimal 1 tahun dan dibuktikan dengan surat keterangan tempat bekerja

VI. LIST / DAFTAR PSC 119 INTEGRASI

- a. EXISTING
 1. PSC 119 Aceh
 2. PSC 119 Provinsi Sumatera Selatan
 3. PSC 119 Kab Bangka
 4. PSC 119 Kota Yogyakarta
 5. PSC 119 Kota Solo
 6. PSC 119 Kab Wonosobo
 7. PSC 119 Boyolali
 8. PSC 119 Kab Tulungagung
 9. PSC 119 Kab Bekasi
 10. PSC 119 Kota Bekasi
 11. PSC 119 Kab Sragen
 12. PSC 119 Kendal
 13. PSC 119 Kota Cirebon
 14. PSC 119 Kab Tuban
 15. PSC 119 Provinsi Bali
 16. PSC 119 Kota Makassar
 17. PSC 119 Provinsi Sulawesi Utara
 18. PSC 119 Kab Bantaeng
 19. PSC 119 Kota Medan
 20. PSC 119 Kab Rokan Hulu Riau
 21. PSC 119 Kab OKU Sumsel
 22. PSC 119 Kab Bogor
 23. PSC 119 Kab Banyumas
 24. PSC 119 Provinsi Sulawesi Tengah
 25. PSC 119 Kota Malang
 26. PSC 119 Kab Rejang Lebong Bengkulu
 27. PSC 119 Kab Gorontalo
 28. PSC 119 Kab Pinrang Sulsel
 29. PSC 119 Kab Sambas Kalbar
 30. PSC 119 Hulu Sungai Tengah Kalsel

b. BARU 2020

1. PSC 119 Kab Aceh Jaya
2. PSC 119 Kota Padang
3. PSC 119 Kota Semarang
4. PSC 119 Provinsi Jawa Timur
5. PSC 119 Kab Sidoarjo
6. PSC 119 Kab Banyuwangi
7. PSC 119 Kab Batang Jateng
8. PSC 119 Kota Bitung Sulut
9. PSC 119 Kab Rembang Jateng
10. PSC 119 Kota Kendari
11. PSC 119 Kab Prabumulih Sumsel
12. PSC 119 Kota Banjarmasin
13. PSC 119 Kota Sorong
14. PSC 119 Kota Serang
15. PSC 119 Kab Bungo Jambi
16. PSC 119 Kota Dumai Riau
17. PSC 119 Kota Metro Lampung
18. PSC 119 Kab Bulungan Kalut
19. PSC 119 Kab Dairi Sumut
20. PSC 119 Kab Kolaka Utara
21. PSC 119 Kab Bangli Bali
22. PSC 119 Kota Magelang
23. PSC 119 Kab Toba Samosir Sumut
24. PSC 119 Kab Simalungun Sumut
25. PSC 119 Kab Konawe Sulawesi Tenggara
26. PSC 119 Kab Kep. Sula Maluku Utara

1/2